
Bab 9 Kebijakan Moneter

9.1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui pada umumnya dikenal ada beberapa kebijakan Ekonomi Makro, secara garis besar disebut ada 3 (tiga) kebijakan Ekonomi Makro yang terdiri atas :

- a. Kebijakan Moneter
- b. Kebijakan Fiskal
- c. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Pada bab ini dicoba untuk menguraikan pengertian tentang Kebijakan Moneter, peranan Kebijakan Moneter, sifat Kebijakan Moneter serta Efektivitas Kebijakan Moneter.

Kebijakan Moneter biasanya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar (JUB) dan kredit, stabilisasi harga dan pertumbuhan Ekonomi. Kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan berbagai instrumen kebijakan moneter antara lain:¹

- a. Bank Rate Policy
- b. Operasi Pasar Terbuka
- c. Perubahan Cadangan
- d. Pengawas Kredit Selektif
- e. Moral suasion

Dengan instrumen tersebut diatas diharapkan tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilisasi dan pemerataan dapat dicapai.

9.2. PERANAN KEBIJAKSANAAN MONETER

Kebijakan Moneter itu bagaikan “dawai gitar” karena dapat ditarik untuk meredam inflasi tetapi tidak dapat ditekan (dorong) untuk mengatasi resesi.

Karena hal diatas, oleh Keynes ditawarkan secara simultan penjelasan tentang arti penting Kebijakan Moneter dimana diharapkan mampu meredam depresi.

¹Iswardono SP, *Uang dan Bank* hal 136 atau pada Bab berikut ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan Moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran. Tentunya, semua sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal. Atau dengan perkataan lain melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap.

9.3. RULES VS DISCRETION

Untuk mencapai sasaran tersebut bagaimana Kebijakan Moneter harus dilaksanakan apakah secara teratur mengendalikan JUB, menambah dan mengurangi dengan prosentase tertentu, atau setiap saat diperlukan JUB ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.

Pendapat mengenai pilihan diatas merupakan perdebatan antara dua kubu ekstrim dalam Ekonomi Makro Friedman dan pendukungnya lebih menyukai *RULES*, pengendalian JUB secara teratur dengan cara JUB tumbuh dengan suatu k% secara konstan dengan tujuan jangka panjang. Ini berarti bahwa perubahan JUB tidak tergantung pada nilai-nilai variabel ekonomi makro baik yang telah lampau maupun yang akan datang.

Sebagai lawan dari cara pengaturan JUB diatas adalah “discretionary policy” yang secara vokal dihembuskan oleh para penasihat ekonomi Presiden Kennedy dan Johnson dimana kebijakan yang dijalankan ditandai dengan perubahan yang sering terjadi pada JUB yang tergantung pada nilai-nilai variabel ekonomi makro yang telah lampau maupun yang akan datang.

Usulan Kebijakan Moneter selaras (rules) diharapkan juga diikuti oleh Kebijakan Fiskal selaras (rules) dengan menentukan suatu tingkat pajak (tax-rates) dan rencana pengeluaran yang tidak dipengaruhi oleh kegiatan dunia usaha.

Sedang Kebijakan Fiskal yang diskrit akan merubah tingkat pajak dan rencana pengeluaran sehingga anggaran bergerak sesuai dengan kegiatan dunia usaha dan kalau perlu lebih tinggi sehingga para penganjur kebijakan ini menolak adanya Anggaran Berimbang.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa Kebijakan Diskrit akan memperbesar Daur Dunia Usaha (Business Cycles). Dan Kebijakan Selaras biasanya netral dalam artian tidak pernah akan memperbesar atau memperkecil ekspansi dan kontraksi perekonomian.

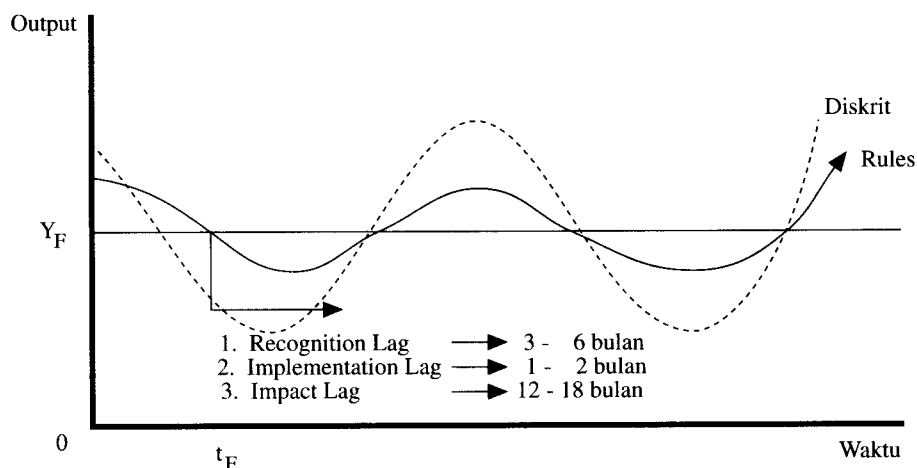
Kalau digambarkan, perbandingan antara Kebijakan Selaras dengan Kebijakan Diskrit, sebagai gambar 9.3.1 berikut ini :

9.4. KESENJANGAN KEBIJAKSANAAN

Pada Gambar di atas ditunjukkan perbedaan antara Kebijakan Diskrit dan Selaras dalam hal kesenjangan waktu yang diperlukan. Dalam hal ini dikenal adanya :

- (1). Kesenjangan Pengenalan (Recognition lag) biasanya 3 sampai 6 bulan.

Gambar 9.3.1
Kebijaksanaan Diskrit dan Rules



- (2). Kesenjangan Implementasi (Implementation lag), biasanya 1 sampai 2 bulan.
- (3). Kesenjangan Dampak (Impact lag) biasanya 12 bulan sampai 18 bulan.

Kesenjangan Pengenalan yaitu jarak waktu yang diperlukan untuk mengetahui adanya sesuatu masalah ekonomi yang memerlukan suatu kebijaksanaan oleh pembuat kebijaksanaan. Kesenjangan Implementasi adalah jarak waktu antara diketahuinya suatu masalah yang memerlukan suatu kebijaksanaan dengan implementasi kebijaksanaan yang dipilih. Dan kesenjangan Dampak adalah jarak waktu antara implementasi kebijaksanaan dengan dampak kebijaksanaan tersebut terhadap perekonomian.

Sering Kesenjangan Pengenalan dan Implementasi disebut Kesenjangan Dalam (Inside lag) dan Kesenjangan Implementasi yang terjadi setelah Kesenjangan Pengenalan biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan. Jika Kesenjangan Implementasi untuk Kebijakan Moneter singkat dan dapat diramalkan, untuk Kebijakan Fiskal biasanya panjang dan bervariasi karena memerlukan sidang DPR yang berlarut-larut.

Kesenjangan Dampak mungkin yang paling kontroversial. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman bahwa Kesenjangan Dampak dari Kebijakan moneter biasanya panjang dan sedikit bervariasi. Dalam pihak kelompok Keynes dengan Model Strukturalnya menemukan bahwa Kesenjangan Dampak memerlukan waktu 1(satu) tahun penuh sebelum Kebijakan Moneter mempunyai pengaruh terhadap perekonomian dan dampak secara keseluruhan baru disadari sampai 4(empat) tahun kemudian. Rata-rata kesenjangan totalnya kira-kira 2 tahun, bisa kurang atau lebih.

9.5. ALASAN KEBIJAKSANAAN MONETER SELARAS

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh para penganjur Kebijakan Moneter Selaras adalah sebagai berikut:

- a. "Money Matters", artinya mereka percaya bahwa JUB mempunyai pengaruh yang penting pada permintaan agregat (A.D). Ini merupakan persyaratan yang perlu meskipun belum cukup.
- b. Kebijakan Moneter Selaras hanyalah merupakan cara agar Bank Sentral mempertimbangkan JUB dengan perkataan lain bahwa kebijaksanaan ini memaksa Bank Sentral untuk mempertimbangkan JUB saja.

Menurut Kelompok Moneter (Monetarist) Kebijakan Selaras lebih disukai daripada Kebijakan Diskrit dikarenakan 2 hal yaitu:

- a. perekonomian pada dasarnya stabil
- b. kesenjangan (lag) kebijaksanaan pada umumnya panjang dan bervariasi.

9.6. JALUR KEBIJAKSANAAN MONETER

Pada awal bab ini dikenal adanya instrumen kebijaksanaan moneter maka pada sub bab ini akan dibahas tentang jalur mana yang akan ditempuh dalam menjalankan Kebijakan Moneter.

Jalur Kebijakan Moneter ini berkaitan dengan "keterkaitan" antara uang dan pendapatan nasional atau dengan perkataan lain perubahan JUB akan menyebabkan perubahan pendapatan nasional. Bukti empiris menunjukkan adanya 3 (tiga) jalur kebijaksanaan moneter yaitu :

- (a) suku bunga
- (b) pagu kredit
- (c) kekayaan

Menurut model Keynes, suku bunga merupakan satu-satunya jalur kebijaksanaan moneter dimana dikenal adanya transmisi mekanisme Keynes yaitu adanya perubahan JUB akan menyebabkan perubahan suku bunga yang selanjutnya diikuti oleh perubahan investasi dan yang pada akhirnya akan merubah Pendapatan Nasional.

Sedangkan menurut Friedman suku bunga mempunyai pengaruh pada semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran untuk barang-barang konsumsi tahan lama maupun barang-barang yang lainnya.

Pagu Kredit terjadi kalau suku bunga dianggap tetap (sebagaimana terjadi di negara kita sebelum Deregulasi Perbankan) karena suku bunga merupakan salah satu bentuk provisi dalam perjanjian hutang. Dengan adanya perubahan pagu kredit diharapkan kebijaksanaan moneter akan berpengaruh pada permintaan agregat meskipun suku bunga dianggap konstan. Hal ini pula yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya Deregulasi Perbankan diharapkan tujuan pembangunan Indonesia dapat dicapai.

Jalur ketiga kebijaksanaan moneter adalah adanya dampak kekayaan (wealth effect) yang berpengaruh kepada konsumsi sehingga adanya pengaruh uang terhadap kekayaan seseorang akan berpengaruh pada konsumsinya dan akhirnya akan berpengaruh pada Pendapatan Nasional.